



PROSIDING KICK OFF PROGRAM INFID 2022

“Memperkuat Kapasitas Kelembagaan CSO Dalam Mendukung Pelaksanaan dan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) yang Multipihak”

Jakarta, 01 April 2022



DAFTAR ISI

PENDAHULUAN	1
TUJUAN	2
HASIL YANG DIHARAPKAN	2
PENGANTAR	3
SAMBUTAN DIREKTUR EKSEKUTIF INFID	4
SAMBUTAN DIREKTUR REGIONAL FORD FOUNDATION	5
PIDATO KUNCI DAN PELUNCURAN PROGRAM OLEH KEMENDAGRI	6
SESI DISKUSI 1	8
Paparan Narasumber	8
Tanggapan Peserta	10
Respon Narasumber dan Closing Statement	11
Kesimpulan dan Penutupan oleh Fasilitator	11
SESI DISKUSI 2	12
Paparan Narasumber	12
Tanggapan Peserta	14
Respon Narasumber dan Closing Statement	15
Kesimpulan dan Penutupan oleh Fasilitator	16
LAMPIRAN	17
Lampiran 1. Susunan Acara	17
Lampiran 2. Daftar Hadir	18

PENDAHULUAN

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) merupakan arah dan pencapaian agenda pembangunan global yang memiliki target dan indikator yang mempertimbangkan aspek lingkungan dan keberlanjutan. TPB dideklarasikan oleh PBB dan diadopsi oleh 193 negara sejak tahun 2015 dan diharapkan dapat tercapai pada tahun 2030. Sampai dengan saat ini hanya tersisa 8 tahun lagi untuk memaksimalkan pelibatan semua pihak agar target dan tujuan TPB dapat tercapai di tahun 2030.

Presiden Joko Widodo pada Sidang Umum PBB 2021 menyampaikan bahwa inklusivitas adalah prioritas utama kepemimpinan Indonesia. Hal ini selaras dengan komitmen Indonesia pada prinsip utama TPB yaitu *No One Left Behind*. Komitmen Presiden ini menekankan arti penting kolaborasi atau pelibatan semua pihak sebagai motor percepatan agenda pembangunan, khususnya dalam situasi pandemi dan pemulihan kedepan. Pelaksanaan dan pencapaian TPB akan sulit apabila hanya dilakukan oleh pemerintah. Oleh sebab itu, kolaborasi menjadi sangat penting dan dipengaruhi oleh pemahaman publik dan kapasitas untuk mengintegrasikan TPB dalam pembangunan.

Adopsi TPB di tingkat nasional telah dilakukan dengan mengintegrasikan 124 target TPB ke dalam RPJMN tahun 2020-2024. Ditingkat daerah, upaya pencapaian TPB telah dilakukan dengan mengintegrasikan instrumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang selaras dengan TPB ke dalam RPJMD. Namun, kendalanya sampai saat ini, RAD Provinsi baru ada di 30 provinsi (per Oktober 2021), sedangkan Perpres TPB No. 59 Tahun 2017 menargetkan bahwa setiap Gubernur telah menyusun RAD TPB lima tahunan bersama Bupati/Walikota di wilayahnya masing-masing dengan melibatkan pemangku kepentingan.

Berdasarkan laporan dokumen ESCAP APFSD pada bulan Maret 2022, pencapaian TPB di kawasan Asia dan Pasifik juga sangat sulit tercapai. Situasi tersebut semakin diperburuk karena adanya pandemi COVID19 yang menyebabkan untuk pertama kalinya skor Indeks TPB rata-rata global tahun 2020 turun sejak tahun 2015. Pandemi COVID19 juga telah berdampak signifikan terhadap semua pencapaian tujuan TPB di semua negara termasuk Indonesia pada kondisi sosial-ekonomi dan kualitas sumber daya manusia.

CSO sebagai aktor mitra pembangunan juga telah memberikan bukti nyata dalam respon dan penanganan pandemi seperti inisiatif Sambatan Jogja (Sonjo) yang menyediakan shelter bagi warga penderita COVID19 dan membantu percepatan proses vaksinasi di daerah Yogyakarta. Namun, CSO juga mengalami dampak pandemi. Hasil survei INFID (2020) menyatakan bahwa 72% CSO terdampak pandemi COVID, dimana 23% dalam kondisi kritis (tidak lagi beroperasi). Situasi ini tentunya memberikan bukti bahwa CSO saat ini mengalami kerentanan kelembagaan dan keberlanjutan, namun tetap berupaya melakukan pelayanan dan pendampingan kepada warga.

Untuk memperkuat kelembagaan dan keberlanjutan CSO dan bermitra dengan pemerintah khususnya pemerintah daerah dalam menjalankan pelaksanaan dan pencapaian TPB, INFID didukung oleh Ford Foundation dan Direktorat Organisasi Kemasyarakatan Kementerian Dalam

Negeri RI sebagai pembina organisasi kemasyarakatan (ormas) telah melaksanakan Kick-Off program “Memperkuat Kapasitas dan Ketahanan Lembaga CSO Dalam Mendukung Pelaksanaan dan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang Multipihak” yang dilaksanakan pada 1 April 2022 di Hotel Aryaduta Menteng, Jakarta.

TUJUAN

Kegiatan ini memiliki tujuan yakni:

1. Meluncurkan dan memperkenalkan program “Memperkuat Kapasitas dan Ketahanan Lembaga CSO Dalam Mendukung Pelaksanaan dan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) yang Multipihak”.
2. Memahami kendala, potensi dan program-program kemitraan CSO, pemerintah dan kerjasama multipihak dalam mendukung pencapaian TPB khususnya di tingkat daerah.
3. Menggali rekomendasi dan tanggapan terkait rencana kerja kemitraan untuk TPB di daerah.

HASIL YANG DIHARAPKAN

Adapun hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah:

1. Mitra daerah terinformasi dengan baik rencana kerja program kedepan.
2. INFID dan mitra di pusat maupun daerah sepakat melakukan pembagian peran dalam rangka mendorong pelaksanaan dan pencapaian TPB di daerah dan pusat.
3. Menerima tanggapan dan rekomendasi terkait rencana kerja untuk TPB dalam kerangka kerja program.

PENGANTAR



Gambar 1. MC (Kemendagri) mengantarkan Acara Pembukaan

MC (Kemendagri) membuka acara dengan menyambut para undangan dan menyanyikan lagu Indonesia raya. Setelah memberikan pengantar acara, MC mempersilahkan bapak Sugeng Bahagijo selaku Direktur Eksekutif INFID dan bapak Alexander Irwan selaku Direktur Regional Ford Foundation untuk memberikan kata sambutan. Setelah kata sambutan, dilanjutkan dengan pidato kunci dari bapak Dr. Drs Imran, M.Si, MA selaku Sekretaris Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum dan pemukulan gong (bersama Direktur INFID dan Direktur Regional Ford Foundation) sebagai penanda *Kick-Off* program dimulai.

SAMBUTAN DIREKTUR EKSEKUTIF INFID



Gambar 2. Sambutan oleh Sugeng Bahagijo - Direktur Eksekutif INFID

Sugeng Bahagijo – Direktur INFID menyambut para undangan dan tamu yang hadir dalam kegiatan *Kick off* program INFID, “Memperkuat Kapasitas dan Ketahanan Lembaga CSO Dalam Mendukung Pelaksanaan dan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang Multipihak”. Sugeng mengingatkan dan memberi semangat kepada para hadirin dalam melanjutkan penguatan dan meneguhkan komitmen SDGs di seluruh wilayah Indonesia pada tahun 2030.

Terima kasih disampaikan kepada Kemendagri dan Ford Foundation sebagai mitra kerja dalam mendorong SDGs kedepan. SDGs difokuskan pada pembangunan SDM dan Lingkungan hidup, walau berfokus pada teknokrasi namun penguatan kelembagaan CSO dapat dibangun dari wilayah kerja-kerja prioritas pada kedua isu pembangunan tersebut di tingkat kabupaten dan kota.

Beliau juga menyampaikan bahwa kerja INFID dalam C20 pada Presidensi G20 2022 Indonesia diharapkan dapat mewujudkan keadilan dan keberlanjutan pembangunan yang nantinya dapat meningkatkan kesejahteraan di negara berkembang. Sebagai contoh seperti vaksinasi universal (hak yang harus didapatkan setiap warga negara) dan beberapa agenda-agenda kebijakan lainnya untuk mewujudkan pembangunan yang adil dan berkelanjutan.

Pertemuan ini diharapkan tidak hanya mengidentifikasi masalah tetapi juga memunculkan rencana aksi bersama untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Hal ini dapat dilakukan dengan berbagi praktik baik dari wilayah kerja masing-masing. INFID juga akan berbagi mengenai contoh baik pembangunan sosial dalam kerangka SDGs di lintas negara dan di wilayah Indonesia yang dapat menjadi pembelajaran semua pihak dalam mewujudkan capaian SDGs.

SAMBUTAN DIREKTUR REGIONAL FORD FOUNDATION



Gambar 3. Sambutan oleh Alexander Irwan - Direktur Regional Ford Foundation

Alexander Irwan – Direktur Regional Ford Foundation menyampaikan sambutannya dan memberikan ucapan terima kasih kepada seluruh mitra yang telah hadir. Acara *Kick Off* program ini menjadi energi positif bagi Ford Foundation karena akan memperkuat kelembagaan CSO dan mewujudkan kebermanfaatannya atas capaian SDGs.

Indonesia dan INFID sangat berperan dalam agenda SDGs yang merupakan lanjutan dari MDGs (Millennium Development Goals). Dalam forum global agenda persiapan SDGs, Indonesia menjadi 1 dari 3 *Co-Chair* pada waktu persiapan global SDGs yaitu oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Presiden SBY mendorong agar agenda SDGs ditingkatkan global, regional dan nasional segera disusun dan dilakukan.

Sejak tahun 2013, INFID telah bekerja sama dengan Ford Foundation untuk mengawal SDGs. Upaya yang dilakukan oleh INFID sangat tepat untuk mendorong tercapainya SDGs pada tahun 2030 dengan bekerja sama secara multipihak di tingkat nasional dan daerah.

Indonesia diproyeksikan menjadi negara maju di tahun 2040. Hal ini menyebabkan filantropi dana internasional mengurangi pendanaannya bagi CSO karena para donor berpindah ke negara-negara lain yang dinilai lebih miskin daripada Indonesia. Oleh sebab itu, Ford Foundation mengupayakan untuk meningkatkan kapasitas CSO baik yang saat ini menjadi mitra ataupun non-mitra agar CSO kedepannya mampu bertahan secara pendanaan maupun kapasitas organisasi. Ford juga mengawal komitmen pemerintah Indonesia kepada CSO – yang dinilai sebagai pilar pembangunan dan demokrasi – untuk memperoleh peluang pendanaan dari pemerintah contohnya Swakelola Tipe 3.

PIDATO KUNCI DAN PELUNCURAN PROGRAM OLEH KEMENDAGRI



Gambar 4. Pidato Kunci dan Peluncuran Program oleh Sekretaris Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri - Dr. Drs. Imran, M.Si, MA

Bapak Imran mewakili Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri menyambut para peserta dan tamu undangan yang hadir dengan disertai permintaan maaf mewakili Dirjen yang berhalangan hadir karena sedang menyelesaikan PP 58 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan UU Ormas. Pada kesempatan ini, Bapak Imran menyampaikan tentang peraturan terkait keormasan dimana secara konstitusi kebebasan berkumpul dan berserikat dilindungi oleh UU. Dengan penekanan bahwa kebebasan berkumpul dan berserikat harus sesuai aturan yang berlaku yakni tidak boleh mengganggu masyarakat lain.

Saat ini terdapat 473.655 ormas yang berbadan hukum dan terdaftar di Kemendagri, Kemenkumham dan Kemenlu. Total ormas yang terdaftar di Kemendagri adalah 470.996. Ormas sangat berpotensi untuk memperkuat bangsa namun, jika tidak dikelola dengan baik dapat mengganggu ketertiban umum. Pemerintah mengharapkan seluruh ormas memiliki kemampuan yang sama dalam menjalankan program dan dapat mendukung kebijakan pembangunan sosial politik di Indonesia.

INFID dan anggotanya telah lama berkontribusi dalam program pembangunan seperti advokasi kebijakan, pembangunan sosial, inklusif dan sebagainya. Hal ini dibuktikan melalui peranan INFID saat mendorong transisi MDGs ke SDGs. Pemerintah mengakui bahwa untuk mencapai agenda TPB/SDGs seperti mengurangi ketimpangan, kemiskinan dll bukanlah hal yang mudah. Namun, Pemerintah akan tetap berkomitmen untuk mencapai agenda tersebut dengan kerjasama multipihak (lintas kementerian/lembaga dan CSO).

Pemerintah (Kemendagri) menekankan bahwa terkadang satu komponen yang tidak mendukung dalam program dan pembangunan akan menjadi kendala kedepannya. Pemerintah

berharap akan adanya kolaborasi yang baik antar elemen dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten), CSO, Sektor Swasta dan Akademisi.



Gambar 5. Kick-Off Program dan Dokumentasi bersama Peserta

Bapak Imran berharap, setelah program *Kick-Off* akan ada rencana tindak lanjut untuk agenda kolaborasi di tingkat daerah masing-masing. Di akhir sambutan, Pemerintah menaruh harapan besar agar dalam pembinaan ormas kedepannya akan mendukung pembangunan nasional. Ormas yang terlibat maupun yang belum terlibat diharapkan akan dapat termotivasi untuk berbagi praktik baik dalam memunculkan ide-ide yang kuat terkait aktivitas dan program kegiatan masing-masing.

Berkelanjutan / TPB, 2) mengembangkan rencana kerja bersama antara CSO dan SDGs Center Universitas di daerah dan pemerintah daerah untuk mendukung pelaksanaan dan pencapaian TPB di daerah, 3) Amplifikasi praktik baik dari daerah mengenai pelaksanaan dan pencapaian TPB, dan 4) Mengembangkan informasi mengenai TPB yang mudah dipahami oleh pemangku kepentingan di daerah

Ketiga, 10 daerah yang akan menjadi target lokasi program adalah Banda Aceh, Bengkulu, Cirebon, Yogyakarta, Kulon Progo, Semarang, Bojonegoro, Makassar, Maros dan Kupang.

Keempat, praktik baik dalam kolaborasi mendorong implementasi SDGs (Dokumen Praktik Baik disusun oleh UN DESA) menunjukkan bahwa usulan praktik baik diusung oleh CSO. Salah satu contoh praktik baik di Argentina adalah program kartu debit sembako yang diberikan kepada keluarga yang memiliki balita khususnya, dalam peningkatan gizi untuk mencegah stunting. Dengan adanya jaminan makanan dan gizi bagi anak-anak, penghasilan rumah tangga dapat dialihkan untuk kebutuhan pokok lainnya. Program tersebut berkontribusi untuk mengurangi potensi rumah tangga masuk kedalam kelompok kemiskinan ekstrim. Dalam aspek keberlanjutan, orang tua juga memiliki pola pikir untuk memberi pangan sehat dan bergizi untuk anak-anak.

- **Prayogo - Subdit Pemberdayaan Ormas Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri**

Prayogo memaparkan terkait “Peran Ormas dalam Memperkukuh Kemitraan antar Pemerintah dan Ormas”

Saat ini, data Ormas di Indonesia yang terdaftar di Kemendagri, Kemenkumham, dan Kemenlu adalah sebanyak 473.655. Harapannya, ormas yang terdaftar kedepannya dapat berkolaborasi dengan pemerintah di daerah dalam mewujudkan pembangunan.

Pada tahun 2019, untuk mendukung kerja ormas, Kemendagri memberikan penghargaan untuk mengapresiasi ormas yang telah berkontribusi dalam kerja kolaborasi menuju pembangunan berkelanjutan. Pada tahun 2021, diselenggarakan juga ormas expo secara daring untuk dapat meningkatkan kapasitas ormas lokal terkait wawasan kebangsaan.

Tahun ini, rencananya akan ada pelatihan terkait penguatan dan peningkatan kapasitas ormas terkait Ideologi Pancasila di Aceh. Selain itu, juga ada rencana kolaborasi dengan INFID tentang sistem pendaftaran ormas dengan memanfaatkan transformasi digital yang akan *launching* di Sulawesi Selatan. Saat ini data sudah tersedia di website Kemendagri dan dapat diakses secara publik. Beliau juga menyampaikan bahwa ormas dapat mendaftar di kesbangpol terdekat.

Ada beberapa peluang untuk dukungan pendanaan bagi ormas seperti program-program peningkatan nasionalisme dan wawasan kebangsaan dan kerjasama-kerjasama yang dapat dibangun oleh ormas dalam pengembangan usaha / entrepreneurship berbasis organisasi masing-masing.

Tanggapan Peserta



Gambar 7. Tanggapan Peserta pada Sesi Diskusi 1

- **Riswanto - Kesbangpol Provinsi Jatim**

Riswanto berharap agar ormas asing lembaga asing yang ingin melakukan kegiatan melapor ke Bappeda Provinsi agar dapat memperkuat kolaborasi atau dukungan dari pemerintah daerah. Terkadang masih banyak lembaga asing yang menggunakan data lama sehingga ketepatan lokasi dan isu program menjadi kurang tepat. Jika koordinasi terbangun, pemerintah dapat berbagi data terbaru yang dapat mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan kedepannya. Kesbangpol sangat berkepentingan dalam segi pengawasan dan pemda juga dapat menunjukkan daerah-daerah yang perlu diintervensi agar tidak tumpang tindih intervensinya (pemerataan).

- **Riswati - Flower Aceh**

Riswati membagikan pengalamannya di Banda Aceh. Adaptasi terhadap transisi MDGs menjadi SDGs memberikan proses pembelajaran terkait kerjasama multipihak dimana yang terlibat tidak hanya CSO, tetapi juga dari kampus dan pemerintah. Kolaborasi sudah dilakukan sejak lama bahkan sejak penyusunan matriks. Saat itu, ada tuntutan bahwa kerja-kerja CSO harus masuk dalam matriks kerja SDGs, dan harapannya juga dapat masuk dalam kerangka kerja pemerintah di tingkat daerah.

Proses kolaborasi proyek SDGs berdampak pada kerja-kerja kemitraan lainnya dengan model kolaboratif, seperti musrembang, dan proses-proses kerja pemerintahan selanjutnya banyak yang melibatkan CSO, misalnya kerja bersama yang memungkinkan CSO untuk mengakses dana dari swasta (CSR). Artinya kerja-kerja yang berkembang bukan hanya dalam hal SDGs, tetapi juga dalam hal kerja-kerja lain seperti advokasi kebijakan dan filantropi.

- **Amri Akbar - Bappeda Makassar.**

Amri menyampaikan bahwa pendataan ormas penting untuk jangka panjang. Diperlukan sistem yang dapat memantau penghitungan jumlah CSO dan ormas tersebut. Bappeda juga ingin mendapatkan informasi program kerja yang dilakukan CSO, sehingga kedepan dapat disinkronisasi dengan agenda pemerintah, misalnya RKPD. Ini menjadi kerja kolaboratif kedepan bagi pemerintah daerah, khususnya pemerintah Makassar ingin mengawal capaian program SDGs kedepan.

- **Mudopati - Kesbangpol Kulon Progo**

Perlu ada aksi bersama yang dilakukan pasca kegiatan Kick-Off. Selama pandemi, Pemkab Kulon Progo memiliki program *Gentong Rembes* (solidaritas sosial dalam menghadapi pandemi COVID 19). Harapannya, untuk tindak lanjut kedepan CSO yang hadir pada kegiatan Kick-Off dapat berkolaborasi bersama Pemkab Kulon Progo.

Respon Narasumber dan Closing Statement

- **Bona - Senior Program Officer SDGs INFID**

Aksi bersama yang dibangun INFID, antara lain: 1) Membentuk forum peer learning *group* untuk memetakan apa yang menjadi kemajuan dan capaian di daerah, prioritas isu, dan inovasi-inovasinya, 2) Memberikan dukungan teknis untuk melakukan kegiatan antara CSO daerah dengan masing-masing pemda dalam mendukung pencapaian sektoral SDGs, 3) Membuat kajian pelaksanaan TPB dari masing-masing daerah yang dapat menjadi bahan best practice.

Pada Sesi Diskusi 2, peserta diharapkan dapat *brainstorming* kegiatan apa saja yang dapat diakselerasi oleh CSO dan Pemda. Kerjasama multipihak menjadi upaya yang strategis untuk mencapai TPB atau agenda-agenda transformasi pembangunan.

- **Prayogo - Subdit Pemberdayaan Ormas Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri**

Kehadiran Bappeda dan Kesbangpol dari masing-masing daerah diharapkan dapat mengkoordinasi agenda-agenda kerja antara CSO dan Pemda. Diperlukan forum yang membahas strategi multipihak yang lebih rinci untuk mempercepat capaian SDGs dan agenda pembangunan di daerah. Perlu juga untuk mengetahui sejauh mana agenda ini sudah tercapai selama 3 tahun program. Pasca kegiatan Kick-Off akan ada forum-forum lebih spesifik dan fokus.

Kesimpulan dan Penutupan oleh Fasilitator

Fasilitator menyampaikan beberapa poin penting dalam sesi diskusi 1 yakni:

- 1) Kerjasama antara pemerintah dan masyarakat sipil semakin terbuka dan akan menjadi angin segar untuk membangun kolaborasi untuk mewujudkan pencapaian program-program pembangunan berkelanjutan;
- 2) Inovasi-inovasi dalam agenda pembangunan berkelanjutan antara CSO dan Pemerintah sudah ada, namun perlu diperbanyak dan lebih mendorong agenda yang prioritas untuk menjadi prioritas penganggaran di daerah.
- 3) Prinsip keterbukaan menjadi sangat penting kedepan (terutama dalam membangun kepercayaan) agar terwujud ruang sharing pembelajaran bersama di daerah dalam agenda pembangunan berkelanjutan.

SESI DISKUSI 2

“Workshop Tantangan dan Peluang CSO dalam Kemitraan dengan Pemda untuk Pelaksanaan dan Pencapaian TPB”



Gambar 8. Suasana Sesi Diskusi 2

Paparan Narasumber

- **Yanuar Nugroho - Koordinator Tim Ahli Pelaksanaan Sustainable Development Goals Sekretariat Nasional SDGs Indonesia**

Yanuar menyampaikan tentang tantangan dan peluang CSOs dalam kemitraan dengan pemerintah daerah untuk pelaksanaan dan pencapaian SDGs.

Decade of Action dan pentingnya kerjasama multipihak:

Decade of Action SDGs adalah kerangka kerja bersama yang memastikan *no one left behind* (NOLB). Kemitraan menjadi sangat penting bagi semua aktor khususnya dalam upaya pelokalan SDGs (tidak hanya fokus pada pemerintah pusat, namun demokratisasinya ke daerah).

Komunikasi antar semua aktor sangat diperlukan dan berkaitan dengan pembagian peran aktor. Misalnya, Akademisi dapat berperan dalam produksi pengetahuan dan policy brief, CSO berperan dalam pengawasan dan advokasi kesesuaian agenda, dll.

Tantangan pencapaian SDGs semakin meningkat khususnya dalam situasi pandemi COVID 19. Banyak yang terkena dampak sosial dan ekonomi, perubahan perilaku masyarakat, krisis dan resesi ekonomi, perubahan dan pergeseran rencana, perubahan kebijakan keuangan negara dan keuangan daerah, optimalisasi IPTEK dan sebagainya.

Beberapa tantangan kolaborasi dan upaya membumikan SDGs adalah:

1. Pemahaman konsep dan kerangka SDGs belum merata
2. Pelibatan multipihak
3. Sinergi program kegiatan pusat-daerah
4. Pengukuran capaian SDGs di tingkat subnasional (prov/kab)

Untuk menjawab tantangan SDGs di Daerah, Gubernur perlu menyusun RAD dengan melibatkan CSO, filantropi, pelaku usaha dan pihak terkait serta transparan dalam menyampaikan laporan dan pencapaiannya.

Tanggung Jawab pemda:

1. Memperkuat komunikasi
2. Pengembangan Data
3. Melakukan Pemantauan dan Evaluasi
4. Memperkuat kerjasama antar stakeholder (CSO, Akademisi, dan Filantropi bisnis)

Rencana aksi TPB/SDGs sebagai langkah awal kemitraan multipihak:

1. Penerjemahan ke dalam dokumen perencanaan daerah
2. Koordinasi dan pelaksanaan program

Contoh implementasi kemitraan multipihak (KMP) yang dapat dilakukan di tingkat lokal yaitu musrembang desa/kelurahan, forum SKPD Kota/Kabupaten, musrembang kecamatan, musrembang kota/kabupaten, forum SKPD provinsi, musrembang provinsi dan nasional, dll.

Pada sesi diskusi ini, Yanuar Nugroho menyampaikan dan menggarisbawahi bahwa kedepan keterlibatan CSO bukan hanya sekedar rapat-rapat, namun lebih substantif demi pencapaian SDGs.

- **Khairani Arifin - SDGs Center Universitas Syiah Kuala**

Khairani Arifin menyampaikan bahwa pemerintah tidak bisa bergerak sendiri dalam mencapai target SDGs dengan banyaknya tujuan dan indikatornya. Salah satu pembelajaran yang baik dapat dilihat dari pengalaman Flower Aceh yang ikut mendiskusikan dari awal konsep dan kerangka SDGs.

Kolaborasi yang dilakukan oleh Flower Aceh dan SDG Center Universitas Syiah Kuala menjadi awal pembelajaran yang baik. Dalam mekanisme tata kelola, pelaksanaan SDGs di Banda Aceh telah memunculkan SK Koordinasi dan forum inovasi kabupaten yang melibatkan CSO dan Akademisi. Terdapat pula forum musyawarah rencana aksi perempuan yang setiap tahunnya menjadi fokus pemerintah (peraturan walikota) untuk membangun proses demokrasi dan peningkatan peran perempuan dalam perencanaan pembangunan desa dan kabupaten. Beberapa pembangunan desa semakin berpihak pada perempuan. Proses pembelajaran kolaborasi ini menunjukkan bahwa pemerintah yang membuka diri melalui kolaborasi mampu meningkatkan capaian SDGs yang bermakna dan pembangunan yang substantif-inklusif.

Proses koordinasi dan kolaborasi yang terbangun juga mampu masuk ke SKPD-SKPD di kabupaten selain ke Bappeda. Tantangan yang dihadapi adalah mutasi dan rotasi di Bappeda. Individu-individu PNS daerah yang memiliki komitmen untuk bekerja kolaborasi semakin mempercepat kerja-kerja pencapaian SDGs. Namun, sistem mutasi dan rotasi menurunkan proses dan capaian baik yang telah terbangun. Selain itu kendala lain adalah pemerintah minim anggaran untuk mengagendakan forum-forum koordinasi serta kolaborasi multipihak khususnya bersama CSO.

Dengan sisa waktu yang hanya tinggal 8 tahun lagi, setiap aktor / stakeholder perlu fokus pada tujuan SDGs ditingkat lokal. Aceh saat ini sedang fokus untuk menyelesaikan ketimpangan kemiskinan di tingkat kabupaten dan fokus terhadap isu kesehatan untuk mencegah malgizi pada anak-anak. Aceh juga akan fokus pada isu perdamaian dan penyelesaian konflik masa lalu karena banyak korban belum memperoleh pemulihan hak-hak mereka.

Tanggapan Peserta



Gambar 9. Tanggapan Peserta pada Sesi Diskusi 2

- **Rizal - IDFOS Bojonegoro**

Inisiatif membuat SDGs Center sangat menarik dan perlu ada sosialisasi mengenai tupoksi SDG Center dan hubungan SDGs Center dengan pokja SDGs. Terdapat beberapa perusahaan minyak di Bojonegoro sehingga dapat memaksimalkan peran CSR. Saat ini, pola yang terbangun di pemerintah dan perusahaan bukan berlandaskan perencanaan SDGs, tetapi setelah dilakukan kemudian disesuaikan dengan tujuan-tujuan SDGs (*tagging*). Kiat apa yang dapat dibangun agar SDGs menjadi poin kunci perencanaan pembangunan dan kegiatan?

- **Hari - Bakesbangpol Makassar**

Dengan menerapkan analisa SWOT terlihat bahwa pemerintah paling berperan (perumusan regulasi). Namun kenyataannya dengan kerangka regulasi ini, masih terdapat pemda lain yang regulasinya belum berhasil untuk mendorong pembangunan.

- **Amri - Bappeda Makassar**

Target SDGs sangat ambisius, apakah dimungkinkan dilakukan re-alokasi anggaran dan menurunkan indikator capaian? Susunan SDGs center belum multipihak karena hanya melibatkan akademisi. Kedepannya, perlu diperluas cakupan keterlibatan multipihak untuk berproses bersama. Pemerintah pusat bisa memberi insentif bagi daerah yang memiliki inisiatif lebih dalam mencapai capaian SDGs. Terkait proses musrembang, harapannya CSO sudah hadir di tingkat desa, sehingga ketika di tingkat pemda, musrembang sudah sesuai dengan aspirasi warga dan CSO.

- **Iranda Yudatama - Swaranusa Institute**

Terkait implementasi program, kendala pelaksanaan SDGs di daerah ada pada sosialisasinya, dimana SDGs hanya dipahami ditingkat Bappeda namun di SKPD bahkan sampai di tingkat desa masih banyak yang belum memahami SDGs. Masih ditemukan ada desa yang merasa keberatan (misalnya, implementasi SDG Desa) karena mengganggu peruntukkan anggaran dana desa. Tantangan juga dirasakan di KADIN karena pelibatan sektor swasta belum memiliki kerangka kerja SDGs.

- **Mudopati - Kesbangpol Kulonprogo**

Harapannya, ormas tidak menjatuhkan pemerintah dalam proses kolaborasi. Pemerintah sebenarnya tidak anti kritik, namun berharap agar setiap persoalan dapat dikomunikasikan dengan baik. Ormas tidak boleh mengambil keuntungan di lapangan dari kritik yang demikian.

- **Djonet Santoso - SDGs Center Bengkulu**

SDGs center memiliki peran yang sangat baik atas substansi SDGs yang sejalan dengan tridharma perguruan tinggi. Hal yang dilakukan di SDGs center adalah menjembatani, mengurai keruwetan, dan mendampingi pemerintah. Harapannya sektor bisnis dan pemerintah dapat mengambil manfaat dari penelitian-penelitian yang telah dihasilkan.

Sejalan dengan yang disampaikan oleh Ibu Khairani (Narasumber Ke-2), bahwa mutasi atau rotasi pejabat yang berganti di kepemimpinan lembaga pemerintah Bappeda/Bakesbangpol itu menjadi masalah. Oleh sebab itu, tugas SDGs Center adalah untuk menjembatani terjadinya perubahan-perubahan politik tersebut dan menjaga substansi yang telah berjalan sebelumnya.

Respon Narasumber dan Closing Statement

- **Khairani Arifin - SDGs Center Universitas Syiah Kuala**

Dahulu CSO dan pemerintah tidak menyatu. Namun, saat ini keduanya harus disatukan dalam kerangka kolaborasi. Kesadaran akan kolaborasi, keterbukaan dan rasa saling membutuhkan perlu ditumbuhkan.

Setiap SDGs Center memiliki keragaman dalam kerangka kerja tergantung kebijakan universitas sehingga prioritas SDG Center adalah pada internal universitas. Misalnya SDGs Center berfokus pada capaian dan indikator yang harus dilakukan oleh universitas dengan memberikan beasiswa bagi mahasiswa kurang mampu, melakukan riset dan penelitian yang menjadi permasalahan sosial dan warga, dll. SDGs Center juga sangat mungkin berkolaborasi dengan Pemda misalnya ketika peneliti SDGs Center melakukan penelitian kemiskinan, Pemerintah dapat menggunakan data temuan tersebut. SDGs Center juga bisa berperan untuk asistensi warga dalam memahami kerangka SDGs.

- **Yanuar Nugroho - Koordinator Tim Ahli Pelaksanaan Sustainable Development Goals Sekretariat Nasional SDGs Indonesia**

SDGs center memiliki kerangka kerja dan pendirian yang independen di luar struktur pemerintah.

SDGs sangat ambisius bagi pemerintah Indonesia dan seluruh dunia. Hal ini selaras dengan pernyataan Presiden yang tidak akan menurunkan indikator SDGs karena COVID19.

Agenda kedepan yang dapat dilakukan adalah model Swakelola Tipe 3 dimana pemerintah dapat juga membiayai (menjadi donor) dalam kegiatan yang dikerjakan CSO untuk agenda TPB.

SDGs seharusnya dilihat sebagai agenda yang menyatu dalam proses pembangunan desa dan bukan sebagai pekerjaan tambahan.

Untuk mekanisme pengawasan pelaksanaan TPB, perlu adanya platform pelaporan online yang bisa menjembatani masalah tersebut. Pemerintah harus dikritik sekeras-kerasnya tetapi juga harus dibantu sekuat-kuatnya. Kritik yang diberikan oleh masyarakat sipil itu adalah *unintended consequences (konsekuensi resiko yang tidak direncanakan)* bagi pemerintah. Kemitraan yang mendalam dan *meaningfull* diperlukan untuk proses transformasi yang baik dalam membangun masyarakat yang lebih dewasa.

Kesimpulan dan Penutupan oleh Fasilitator

Fasilitator menyampaikan beberapa poin penting di akhir sesi diskusi 2 yakni:

- 1) Target SDGs sangat ambisius. Maka, kolaborasi menjadi sangat penting untuk memaksimalkan pencapaian SDGs
- 2) Banyak peluang dan sumber daya pendukung yang dapat dimanfaatkan seperti filantropi, dukungan sektor pemerintah dan lembaga donor yang masih punya komitmen untuk mendukung pencapaian TPB.
- 3) Akademisi juga sangat berkomitmen untuk menjadi mitra dalam pengawasan dan mendorong pencapaian SDGs.

Tautan untuk mengunduh Materi Pembicara: <http://bit.ly/Materi-KickOff-BUILD>

LAMPIRAN

Lampiran 1. Susunan Acara

Waktu	Kegiatan
07:00 - 09:00	Antigen dan Pendaftaran
09:00 - 09:07	Pembukaan oleh MC Menyanyikan Lagu Indonesia Raya
09:07 - 09:10	Menyanyikan Lagu Indonesia Raya
09:10 - 09:20	Kata Sambutan: Sugeng Bahagijo, Direktur Eksekutif INFID
09:20 - 09:30	Kata Sambutan: Alexander Irwan, Direktur Regional Ford Foundation
09:30 - 09:45	Pidato Kunci dan Peluncuran Program Secara Resmi (Pemukulan Gong) - Dr. Drs. Bahtiar, M.Si, Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri
09.45 - 09:50	Doa
09:50 - 10:00	Penutupan
10:00 - 10:15	Coffee break (Penampilan Video Kerja INFID)
10:15 - 11:00	Diskusi 1: Paparan Kemitraan Program INFID dan Direktorat Ormas Kemendagri - Bona Tua, Senior Program Officer SDGs INFID: Paparan Rencana Program INFID - Risnandar Mahiwa, (Plt) Direktur Organisasi Masyarakat (Ormas) Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri: Pelibatan CSO dalam Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Pembangunan Daerah
11:00 - 13:30	ISHOMA
13:30 - 14.30	Diskusi 2: Workshop Tantangan dan Peluang CSO dalam Kemitraan dengan Pemda untuk Pelaksanaan dan Pencapaian TPB - Yanuar Nugroho, Koordinator Tim Ahli Pelaksanaan Sustainable Development Goals, Sekretariat Nasional SDGs Indonesia - Khairani Arifin, SDG Center Universitas Syiah Kuala
14:30	Penutupan

Lampiran 2. Peserta Undangan Kegiatan

1. Dirjen PolPum Kementerian Dalam Negeri
2. Direktorat Ormas, Ditjen PolPum Kementerian Dalam Negeri
3. Ford Foundation
4. Sekretariat Nasional SDGs Indonesia

Mitra Daerah

5. Banda Aceh (Flower Aceh, SDG Center Universitas Syiah Kuala)
6. Bengkulu (SDG Center Universitas Bengkulu)
7. Kab.Cirebon (Aisyiyah)
8. Semarang
9. Yogyakarta (Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) dan Institute for Research and Empowerment (IRE))
10. Kulon Progo (Swara Nusa Institute)
11. Bojonegoro (Institute Development of Society (IDFoS) Bojonegoro)
12. Kupang (Yayasan Pengembangan Inisiatif dan Advokasi Rakyat (PIAR) Nusa Tenggara Timur)
13. Makassar (Yayasan Pengkajian Pemberdayaan Masyarakat (YKPM) Sulawesi Selatan)
14. Maros (Yayasan Pengkajian Pemberdayaan Masyarakat (YKPM) Sulawesi Selatan)

Pemerintah Provinsi

15. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Aceh
16. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Bengkulu
17. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Bengkulu
18. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Jawa Barat
19. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Jawa Tengah
20. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
21. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Jawa Timur
22. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Nusa Tenggara Timur
23. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Sulawesi Selatan

Pemerintah Daerah

24. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Banda Aceh
25. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kab. Cirebon
26. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Semarang
27. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Yogyakarta
28. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kab. Kulon Progo
29. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kab. Bojonegoro
30. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Kupang
31. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Makassar
32. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kab. Maros

33. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Banda Aceh
34. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kab. Cirebon
35. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Semarang
36. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Yogyakarta
37. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kab. Kulon Progo
38. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kab.Bojonegoro
39. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Kupang
40. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Makassar
41. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kab. Maros

Mitra Ormas Lokal

42. Yayasan Bani Abdurrahman Wahid
43. Perkumpulan Prakarsa
44. Indonesia Conference on Religion and Peace (ICRP)
45. Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)
46. Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA)
47. Yayasan Ruang Rupa

Daftar Hadir

Kick Off Program BUILD

"Memperkuat Kapasitas CSO Dalam Mendukung Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) yang Multipihak"

01 April 2022, Pukul 09.00 - Selesai

Dilaksanakan Secara Hybrid (Hotel Aryaduta Menteng dan ZOOM Meeting)

No	Nama	L/P/Lainnya	Organisasi
1	Dr. Drs. Bahtiar, M. Si	L	Kemendagri
2	Risnandar Mahiwa	L	Kemendagri
3	Alexander Irwan	L	Ford Foundation
4	Yanuar Nugroho	L	Bappenas
5	Suraji	L	YBAW
6	Victoria Fanggidae	P	Prakarsa
7	Isa Octaviani	P	ICRP
8	Rizka	P	Fitra
9	Ajeng Nurul Aini	P	Ruang Rupa
10	Suwarno	L	INFID
11	Bona Tua	L	INFID
12	Denisa A Kawuryan	P	INFID
13	Sugeng Bahagijo	L	INFID
14	Rini Widyastuti	P	INFID
15	Rinto Leonardo Siahaan	L	INFID
16	Grace Joanessa K. Putri	P	INFID
17	Abda Ali	L	Polpum
18	Abdul Gafur	L	Polpum
19	Yodie Indrawan	L	Polpum
20	Prayogo Heri Cahyono	L	Polpum
21	Cek Putri Humaira	P	Polpum
22	Maya Kartika Sari	P	Polpum
23	Ratu Shaila Luthfia	P	Polpum
24	Diding Soemantri	L	Polpum
25	Redis Orlando Suweni	L	Polpum
26	Dimas Agung Prasetyo		Polpum
27	Norma Hayati	P	Polpum
28	Achmad Ikrom	L	-
29	Ari Wibowo	L	INFID
30	Ajeng Kusumaningrum	P	INFID
31	AD Eridani	P	INFID
32	Liza Aprinita	P	Polpum
33	Eko Indrianto	L	Polpum
34	Malik Ibrahim	L	Polpum
35	Fitron	L	Polpum

No	Nama	L/P/Lainnya	Organisasi
36	Rusli A	L	INDEF
37	Fitrah	L	Polpum
38	Sukarni	P	Polpum
39	Raissa R	P	Polpum
40	Eka Nur I	P	Polpum
41	Rozalina	P	Polpum
42	Esther Anne	P	Ford Foundation
43	Erna Hernawati	P	Polpum
44	Khairani Arifin	P	SDG Center Unsyiah Aceh
45	Riswati S.Pd.I, M. Si	P	Flower Aceh
46	Djonet Santoso	L	SDG Center Univ. Bengkulu
47	Sri Ratna Istiqomah	P	Aisyiyah Cirebon
48	Halimah Ginting	P	KPI
49	Rajif Dwi Angga	L	IRE
50	Iranda Yudhatama	L	Swara Nusa
51	Rizal Zubad Firdaus	L	IDFoS Indonesia
52	Muliadi Prayitno	L	YKPM
53	Diana Purnamasari	P	BAKESBANGPOL ACEH
54	Netti Herawati	P	BAKESBANGPOL Prov. Bengkulu
55	Pradana	L	BAKESBANGPOL Prov. JATENG
56	Amelberga Dita Novirani	P	BAKESBANGPOL Prov. DIV
57	Sulaiman Naipon, S. Sos	L	BAKESBANGPOL Prov Sulsel
58	Muhammad Nazir, S. Sos	L	BAKESBANGPOL Kota Banda Aceh
59	Nia Nurhayati	P	BAKESBANGPOL Kab. Cirebon
60	Joko Hartono, SSTP, M. Si	L	BAKESBANGPOL Kota Semarang
61	Agung Priyanto, S.T	L	BAKESBANGPOL Kota Yogyakarta
62	Mudopati Purbohandowo, SSTP	L	BAKESBANGPOL Kab. Kulon Progo
63	Dr. Hari, S.IP., SH., MH., M. Si	L	BAKESBANGPOL Kota Makassar
64	Haswar Wahid, S. Sos, M. Si	L	BAKESBANGPOL Kab. Maros
65	Ir. Fitri Nurliasari, MP	P	BAPPEDA Kab. Cirebon
66	M. Amri Akbar	L	BAPPEDA Kota Makassar
67	Sulaeman Samad	L	BAPPEDA Kab. Maros
68	Khamim	L	Kesbangpol Jatim
69	Hardhina S. C	L	BAKESBANGPOL Prov. Jatim
70	Biyanto	L	BAPPEDA Bojonegoro
71	Warsono	L	BAKESBANGPOL Bojonegoro